

Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Program Penanganan Permukiman Kumuh di Negeri Batu Merah, Kota Ambon

Alfonsa Maria Lidya Naryemin^{1)*}, Stevianus Titaley²⁾, Wa Ode Sitti Jurianti Aswad³⁾

^{1),2),3)} Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Pattimura

Email : alfonsanaryemin@gmail.com¹⁾*, stevi_74@yahoo.com²⁾, sittijurianti@gmail.com³⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap hasil dari program penanganan permukiman kumuh di Negeri Batu Merah, Kota Ambon. Program ini melibatkan tiga intervensi utama, yaitu NUSP-2 yang fokus pada peningkatan infrastruktur, NAHP yang memberikan bantuan material untuk rumah layak huni, dan KOTAKU yang mencakup pembangunan infrastruktur dasar. Berdasarkan survei dan wawancara dengan 44 responden, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasakan dampak positif dari program ini, terutama dalam perbaikan infrastruktur jalan, drainase, dan penyediaan air bersih, serta peningkatan kualitas rumah. Namun, meskipun sebagian besar masyarakat merasa puas, masih terdapat tantangan terkait pemerataan manfaat, kelengkapan infrastruktur, dan pemeliharaan jangka panjang. Sebagian kecil warga juga merasa bahwa bantuan perbaikan rumah belum mencukupi untuk menutup seluruh kebutuhan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa keberlanjutan hasil program menjadi perhatian utama masyarakat, yang berharap adanya pemeliharaan dan pengawasan yang berkelanjutan. Kesimpulannya, meskipun program telah memberikan hasil yang signifikan, perlu adanya perhatian lebih terhadap pemerataan manfaat dan pemeliharaan jangka panjang agar program ini dapat berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih merata di masa depan. Saran dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan alokasi dana, memperbaiki keterlibatan masyarakat, dan melanjutkan pengawasan serta pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun untuk memastikan keberlanjutan manfaat program.

Kata Kunci : Penanganan Permukiman Kumuh, Persepsi Masyarakat, Keberlanjutan Program

ABSTRACT

This study aims to analyze the community's perception of the outcomes of the slum settlement handling program in Negeri Batu Merah, Ambon City. The program involves three main interventions: NUSP-2, which focuses on infrastructure improvement; NAHP, which provides material assistance for decent housing; and KOTAKU, which includes basic infrastructure development. Based on surveys and interviews with 44 respondents, the results of the study show that the majority of the community has felt a positive impact from the program, particularly in the improvement of road infrastructure, drainage, access to clean water, and the quality of housing. However, despite the general satisfaction, challenges remain in terms of equitable distribution of benefits, infrastructure completeness, and long-term maintenance. A small portion of residents also feels that the housing repair assistance was insufficient to meet all their needs. The study also reveals that the sustainability of the program's results is a major concern for the community, with hopes for continuous maintenance and monitoring. In conclusion, while the program has made significant progress, more attention is needed to ensure equitable benefits and long-term maintenance to ensure the program's sustainability and broader impact. The study suggests increasing budget allocation, improving community involvement, and continuing monitoring and maintenance efforts to ensure the lasting benefits of the program.

Keywords: Slum Settlement Handling, Community Perception, Program Sustainability

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, kota-kota telah menghadapi tekanan urbanisasi, keterbatasan lahan, serta ketimpangan akses infrastruktur yang mendorong munculnya permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Sejak munculnya Kampung Improvement Program (KIP) hingga program yang lebih baru seperti Neighbourhood Upgrading and Shelter Project (NUSP), Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dan National Affordable Housing Program (NAHP), pemerintah berupaya meningkatkan kualitas permukiman melalui penyediaan infrastruktur dasar dan dukungan peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) (World Bank, 2018; Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, 2020). Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanganan kumuh tidak hanya menasar aspek fisik lingkungan, tetapi juga pemenuhan hak atas hunian layak dan pengurangan kesenjangan akses layanan dasar bagi kelompok rentan.

Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa, sekaligus menghadapi keterbatasan fisiografis berupa topografi perbukitan dan pesisir sempit yang mendorong perkembangan permukiman ke sempadan sungai dan pesisir (Toatubun, 2023). Berbagai kajian menunjukkan bahwa permukiman kumuh di Kota Ambon banyak terkonsentrasi di kawasan pesisir dan bantaran sungai yang padat, dengan karakter bangunan semi permanen, akses jalan lingkungan sempit, serta minimnya sanitasi dan drainase (Kwaikamtelat, 2019; Safitri, 2022; Toatubun, 2023). Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, kawasan kumuh di Kota Ambon tersebar di 15 desa/Negeri dengan luas sekitar 123,42 ha, di mana Negeri Batu Merah merupakan salah satu lokasi prioritas dengan luas kumuh sekitar 13,82 ha yang terbagi di kawasan Batu Merah LS, Ongkoliong, dan Oihu (Pemerintah Kota Ambon, 2023).

Berbagai penelitian di Ambon menunjukkan bahwa kawasan seperti Batu Merah memiliki karakteristik kepadatan tinggi, kualitas bangunan rendah, keterbatasan sarana sanitasi, dan kerentanan terhadap banjir serta pencemaran, terutama di koridor Jalan Sultan Hasanuddin dan sempadan Kali Batu Merah (Kwaikamtelat, 2019; Toatubun, 2023). Gambaran ini menempatkan Negeri Batu Merah sebagai salah satu kantong kumuh penting di Kota Ambon, sehingga menjadi sasaran sejumlah program penanganan kumuh dalam dekade terakhir. Di Negeri Batu Merah, setidaknya terdapat tiga program utama yang masuk dan saling melengkapi, yaitu NUSP-2 yang berfokus pada peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman, NAHP yang menekankan peningkatan kualitas rumah MBR melalui bantuan material dan pembiayaan hunian terjangkau, serta KOTAKU yang mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dasar skala lingkungan dan kawasan untuk mewujudkan permukiman layak huni, produktif, dan berkelanjutan (World Bank, 2018; Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, 2020).

Sejumlah studi di berbagai daerah di Indonesia telah mengevaluasi pelaksanaan program KOTAKU dan penanganan permukiman kumuh dari sudut pandang masyarakat. Kusnah, Satia, dan Putra (2021) meneliti persepsi masyarakat dalam Program KOTAKU di Kelurahan Pahandut, Kota Palangka Raya, dan menemukan bahwa meskipun infrastruktur telah dibangun, pemanfaatan dan pemeliharaan belum optimal karena kesadaran dan rasa memiliki masyarakat yang masih rendah. Yunita dan Musiyam (2020) mengkaji persepsi masyarakat terhadap Program KOTAKU dalam penataan permukiman kumuh di Kampung Sangkrah, Kota Surakarta, dan menunjukkan bahwa warga merasakan perbaikan kualitas lingkungan, namun menyoroti persoalan pemerataan manfaat serta pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Syahpriani, et.al (2020) yang mengevaluasi Program KOTAKU di Desa Sayang, Jatinangor, juga menyimpulkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat permukiman yang belum tertangani, keterbatasan waktu pelaksanaan, dan rendahnya kesadaran lingkungan sebagian masyarakat.

Secara umum, temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program penanganan kumuh tidak hanya ditentukan oleh keluaran fisik seperti panjang jalan rabat beton atau saluran drainase yang dibangun, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat sebagai penerima manfaat memaknai, menilai, dan memanfaatkan hasil program. Persepsi masyarakat terhadap kualitas infrastruktur, ketepatan sasaran penerima bantuan, keadilan distribusi manfaat, serta pelibatan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program menjadi indikator penting yang memengaruhi tingkat dukungan, partisipasi, dan keberlanjutan

pemeliharaan infrastruktur (Kusnah et al., 2021; Syahpriani, 2020; E. M. I. Yunita, 2020). Persepsi yang positif dapat memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*) dan mendorong keterlibatan warga dalam menjaga lingkungan, sedangkan persepsi negatif berpotensi melemahkan kepercayaan kepada pemerintah dan menurunkan keberlanjutan program.

Di sisi lain, kajian mengenai permukiman kumuh di Kota Ambon selama ini lebih banyak berfokus pada pemetaan tingkat kekumuhan dan karakteristik fisik lingkungan. Safitri et al (2022) misalnya, menelaah kondisi permukiman kumuh di salah satu kelurahan di Ambon dan menemukan bahwa permasalahan utama terkait sanitasi, drainase, dan status kepemilikan lahan. Kwaikamtelat (2019) mengkaji karakteristik sosial ekonomi masyarakat di sempadan Kali Batu Merah dan menunjukkan bahwa mayoritas penduduk bekerja di sektor informal dengan keterbatasan kemampuan ekonomi untuk memperbaiki kualitas hunian. Sementara itu, Toatubun et al. (2023) memetakan kondisi fisik permukiman kumuh di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Batu Merah Bawah, dan menyoroti kepadatan bangunan, kualitas konstruksi, dan kerentanan terhadap bencana sebagai faktor penting kekumuhan. Meskipun memberikan gambaran penting tentang kondisi fisik dan sosial, studi-studi tersebut belum banyak mengupas secara spesifik bagaimana masyarakat di Negeri Batu Merah menilai berbagai program penanganan kumuh yang telah masuk, seperti NUSP-2, NAHP, dan KOTAKU, dalam satu kerangka evaluasi persepsi yang komprehensif.

Dari sisi wilayah kajian, sebagian besar penelitian persepsi masyarakat terhadap Program KOTAKU dan program sejenis masih berlokasi di kota-kota di Pulau Jawa atau wilayah daratan dengan karakter geografis yang relatif homogen (Kusnah et al., 2021; Syahpriani, 2020; E. M. I. Yunita, 2020). Studi yang secara khusus mengkaji persepsi masyarakat terhadap program penanganan permukiman kumuh di kota kepulauan seperti Ambon masih sangat terbatas, padahal karakteristik sosial, budaya, dan geografisnya berbeda dengan kota-kota di Jawa. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan pengetahuan (*research gap*) terkait bagaimana warga di kota kepulauan memaknai intervensi program, terutama ketika di satu lokasi terdapat kombinasi beberapa program sekaligus (NUSP-2, NAHP, KOTAKU) dengan bentuk bantuan yang berbeda (infrastruktur lingkungan, perbaikan rumah, penyediaan air bersih, dan lain-lain).

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan beberapa kebaruan. Pertama, penelitian berfokus pada Negeri Batu Merah di Kota Ambon sebagai kawasan permukiman kumuh di kota kepulauan Indonesia Timur yang menjadi lokasi intervensi berbagai program penanganan kumuh sekaligus, sehingga memberikan konteks empiris yang berbeda dari studi-studi sebelumnya di kota-kota Jawa. Kedua, penelitian menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) dengan desain eksplanatori sekuensial, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif terlebih dahulu melalui survei persepsi masyarakat, kemudian memperdalam temuan tersebut dengan data kualitatif melalui wawancara dan observasi. Desain ini diharapkan dapat menangkap tidak hanya tingkat persepsi masyarakat terhadap program, tetapi juga alasan, pengalaman, dan konteks sosial yang melatarbelakangi penilaian tersebut. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan penilaian masyarakat terhadap tiga program utama NUSP-2, NAHP, dan KOTAKU dalam satu kawasan permukiman yang sama, sehingga mampu menggambarkan bagaimana warga membandingkan dan memaknai berbagai bentuk intervensi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

2. DATA DAN METODE

2.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) dengan desain eksplanatori sekuensial. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai persepsi masyarakat terhadap program penanganan permukiman kumuh di Negeri Batu Merah, Kota Ambon. Tahap pertama dilakukan pengumpulan dan analisis data kuantitatif melalui survei persepsi masyarakat. Hasil kuantitatif tersebut kemudian diperdalam pada tahap kedua melalui data kualitatif berupa wawancara mendalam dan observasi lapangan guna menjelaskan alasan, pengalaman, dan konteks sosial di balik penilaian masyarakat

2.2. Variabel dan Fokus Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap program penanganan permukiman kumuh, yang mencakup tiga program utama, yaitu NUSP-2, NAHP, dan KOTAKU.

Persepsi masyarakat dalam penelitian ini dioperasionalkan ke dalam beberapa dimensi, meliputi:

1. Persepsi terhadap pelaksanaan program,
2. Persepsi terhadap output atau hasil program,
3. Persepsi terhadap dampak program,
4. Persepsi terhadap pemerataan manfaat, dan
5. Persepsi terhadap keberlanjutan hasil program.

Dimensi-dimensi tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan instrumen kuesioner dan panduan wawancara.

2.3. Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui beberapa teknik berikut.

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui:

- a) Survei kuesioner kepada masyarakat untuk mengukur persepsi terhadap pelaksanaan program, output program, dampak, pemerataan manfaat, dan keberlanjutan hasil program menggunakan skala Likert. Sebanyak 44 responden menjadi sumber data kuantitatif pada penelitian ini.
- b) Wawancara mendalam kepada informan kunci, seperti aparat setempat/ketua lingkungan serta warga penerima manfaat, untuk menggali pengalaman, penilaian, serta harapan masyarakat terhadap program yang masuk di kawasan tersebut.
- c) Observasi lapangan untuk mengamati kondisi fisik permukiman, hasil pembangunan infrastruktur (misalnya jalan, drainase, dan akses air bersih), serta kondisi rumah dan lingkungan pasca intervensi program.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah dan instansi terkait, laporan pelaksanaan program, serta literatur dan penelitian terdahulu yang relevan. Data ini digunakan untuk memperkuat konteks kebijakan dan kondisi kawasan kumuh di Kota Ambon, khususnya Negeri Batu Merah.

2.4. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis tematik untuk memahami persepsi masyarakat terhadap program penanganan permukiman kumuh.

1. Analisis Deskriptif Kualitatif

Digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan, terutama terkait implementasi program penanganan permukiman kumuh. Data dari wawancara dan observasi dianalisis untuk memberikan gambaran tentang kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di Negeri Batu Merah (Sugiyono, 2014).

2. Analisis Tematik

Mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari data yang dikumpulkan untuk menemukan pola persepsi masyarakat terhadap program. Penelitian ini menggunakan pendekatan top-down, dengan kategori analisis yang telah ditentukan sebelum pengumpulan data (Braun & Clarke, 2006). Langkah-langkah analisis tematik meliputi:

- Pengumpulan Data: Wawancara, observasi, dan telaah dokumen.
- Reduksi Data: Pengidentifikasian satuan data dan pengkodean.

- Kategorisasi: Mengelompokkan data dalam kategori terkait seperti persepsi, sikap, dan partisipasi.
- Pensintesisan: Mencari keterkaitan antar sub-kategori dan mengembangkan tema.
- Penarikan Kesimpulan: Menginterpretasikan dan menyimpulkan hasil analisis (Corbin & Strauss, 2009).

3. Analisis Skoring

Analisis skoring digunakan untuk mengukur persepsi/sikap masyarakat terhadap program penanganan permukiman kumuh (NUSP-2, NAHP, dan KOTAKU) berdasarkan tanggapan responden pada kuesioner. Instrumen kuesioner disusun dalam bentuk pernyataan tertutup dan dinilai menggunakan Skala Likert lima tingkat: Sangat Setuju (SS) = 5, Setuju (S) = 4, Netral (N) = 3, Tidak Setuju (TS) = 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 (Sugiyono, 2017). Skoring dilakukan melalui beberapa tahap berikut.

a) Pemberian skor pada jawaban responden

Setiap jawaban responden pada tiap butir pernyataan diberi nilai sesuai kategori Likert. Jika jumlah butir pernyataan adalah k dan jumlah responden adalah n , maka total respons yang dinilai adalah $n \times k$.

b) Perhitungan skor aktual (skor diperoleh)

Skor aktual dihitung dengan menjumlahkan seluruh skor jawaban responden pada semua butir pertanyaan. Secara operasional, skor aktual dapat dihitung dengan mengalikan frekuensi jawaban pada tiap kategori dengan bobot skornya, lalu dijumlahkan:

$$\text{Skor Aktual} = (f_{SS} \times 5) + (f_S \times 4) + (f_N \times 3) + (f_{TS} \times 2) + (f_{STS} \times 1)$$

di mana f adalah frekuensi jawaban pada masing-masing kategori.

c) Perhitungan skor maksimal

Skor maksimal menunjukkan nilai tertinggi yang mungkin diperoleh apabila seluruh responden menjawab Sangat Setuju untuk seluruh butir pernyataan:

$$\text{Skor Maksimal} = n \times k \times 5$$

d) Konversi skor menjadi persentase (indeks persepsi)

Untuk memudahkan interpretasi dan menyamakan skala antar-aspek, skor aktual dikonversi menjadi persentase/indeks sebagai berikut:

$$\text{Indeks Persepsi (\%)} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$$

Hasil indeks ini yang kemudian ditampilkan dalam bentuk persentase (misalnya 82,05%) sebagaimana digunakan pada bagian hasil penelitian.

e) Penentuan kategori hasil skoring

Indeks persepsi kemudian diinterpretasikan ke dalam kategori tingkat persepsi masyarakat. Untuk menjaga konsistensi penafsiran, penelitian ini menggunakan interval kategori berbasis rentang persentase sebagai berikut:

0–20% = sangat rendah

21–40% = rendah

41–60% = sedang

61–80% = tinggi

81–100% = sangat tinggi

Dengan demikian, nilai indeks yang berada pada rentang 81–100% menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap program berada pada kategori sangat tinggi, sedangkan nilai pada rentang 61–80% menunjukkan kategori tinggi. Kategori ini digunakan untuk membaca kecenderungan penilaian masyarakat pada setiap aspek yang diukur, misalnya terkait pelaksanaan program, ketepatan sasaran, dampak program, pemerataan manfaat, dan keberlanjutan program.

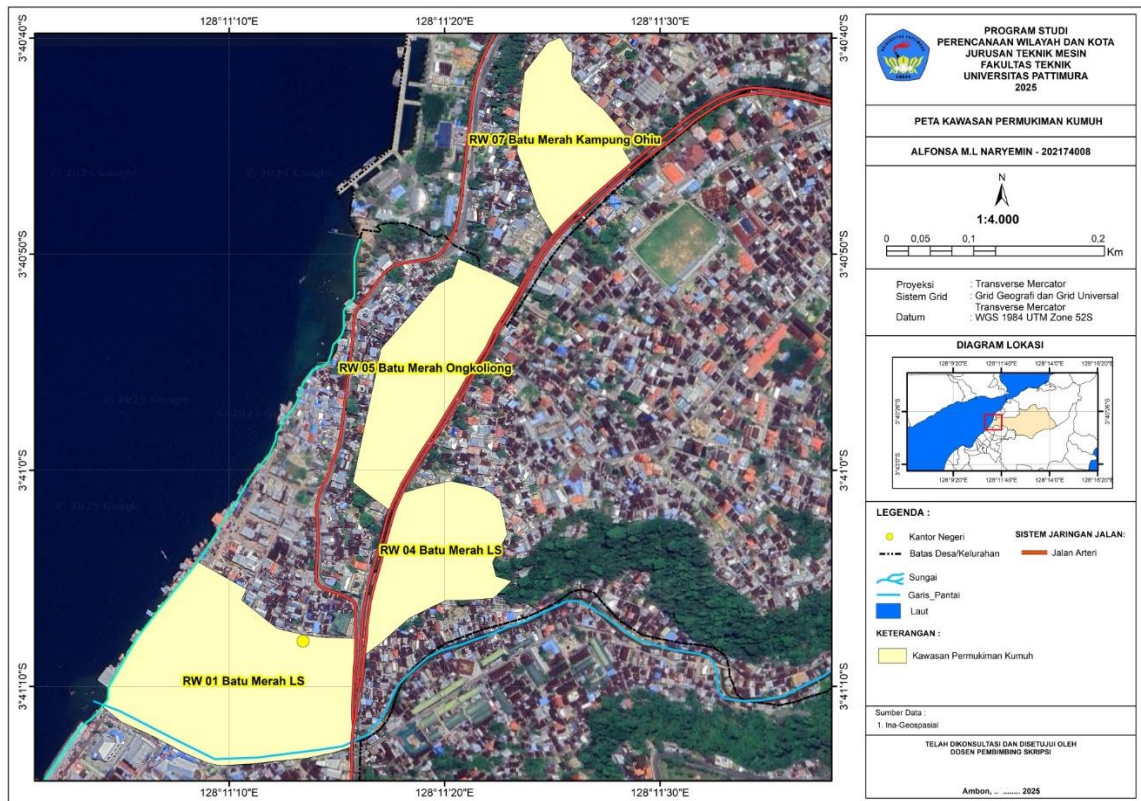
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambar Umum Kawasan

Negeri Batu Merah terletak di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, dan merupakan kawasan strategis yang menghubungkan pusat kota dan pelabuhan. Wilayah ini juga berdekatan dengan kawasan perdagangan dan permukiman padat penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong terbentuknya permukiman informal tanpa perencanaan tata ruang yang jelas. Dengan luas wilayah yang terbatas, sebagian besar permukiman di Batu Merah berkembang di lahan marginal seperti bantaran sungai, lereng perbukitan, dan pesisir, yang mengarah pada permukiman kumuh.

Kondisi permukiman kumuh di Batu Merah ditandai dengan rumah tidak layak huni, kepadatan bangunan tinggi, serta minimnya akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi. Ketidakteraturan bangunan dan terbatasnya ruang terbuka membuat kawasan ini rentan terhadap bencana seperti banjir, longsor, dan penyebaran penyakit berbasis air.

Menurut Keputusan Walikota Ambon Nomor 1716 Tahun 2024, ada tiga kawasan permukiman kumuh di Batu Merah, yaitu Batu Merah LS (3,80 Ha), Kampung Oihu (3,86 Ha), dan Ongkoliong (2,21 Ha), dengan total luas 9,87 Ha dan status kumuh ringan. Masalah utama yang dihadapi adalah kepadatan penduduk, rendahnya kualitas bangunan, buruknya sanitasi, serta keterbatasan infrastruktur dasar. Pemerintah telah menjalankan program seperti KOTAKU, NUSP, dan NAHP untuk memperbaiki kondisi di RW 001, 004, 005, dan 007. Keberhasilan program ini memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lokal agar perubahan yang terjadi berkelanjutan. Berikut ini adalah peta lokasi penelitian.



Gambar 1. Kawasan Permukiman Kumuh Batu Merah

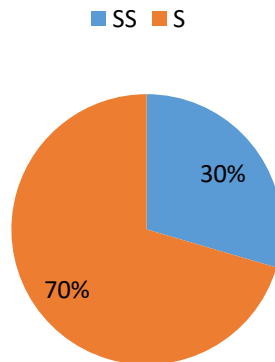
3.2. Sikap Masyarakat terhadap Program Penanganan Permukiman Kumuh Baru Merah

Persepsi masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu program pembangunan, terutama dalam program-program yang menyentuh langsung kehidupan mereka. Salah satunya adalah Program Penanganan Permukiman Kumuh di Negeri Batu Merah, Kota Ambon, yang

bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang selama ini terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap dan persepsi masyarakat terhadap program ini, serta untuk mengetahui tingkat dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan perbaikan permukiman kumuh di wilayah tersebut.

A. Tanggapan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program

Mayoritas masyarakat di Negeri Batu Merah menyambut baik pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh. Berdasarkan hasil kuesioner, sebagian besar responden menyatakan setuju dan sangat setuju terhadap adanya program ini. Mereka merasa bahwa program ini memberikan dampak yang sangat positif, terutama dalam peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan yang lebih layak huni.

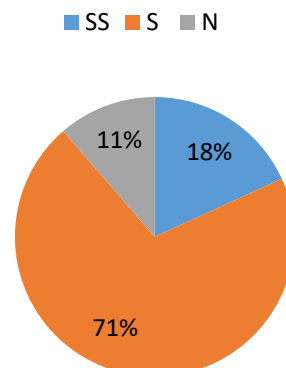


Gambar 2. Sikap Masyarakat Perihal Setuju/Tidak Terhadap Pelaksanaan Program

Wawancara dengan beberapa informan mengungkapkan bahwa perubahan fisik yang signifikan, seperti perbaikan jalan dan pengurangan banjir, menjadi alasan utama mereka memberikan dukungan. Salah seorang warga menyatakan, *"Dulu lingkungan di sini becek, jalannya rusak, kalau hujan air menggenang dan bau tidak sedap. Tapi sekarang sudah jauh lebih baik. Saya pribadi sangat mendukung program ini karena benar-benar bermanfaat untuk kami"* (XBM-IPS-YM, 25-07-25).

B. Dukungan Masyarakat terhadap Program

Lebih dari 70% masyarakat mengungkapkan dukungannya terhadap program penanganan permukiman kumuh ini. Mereka merasa bahwa program ini menjawab permasalahan yang telah lama mereka hadapi, seperti jalan rusak, banjir, dan kurangnya fasilitas dasar.



Gambar 3. Tanggapan Masyarakat Perihal Dukungan adanya Program

Bapak Ketua RW 001 juga menegaskan, *"Saya pribadi sangat mendukung program ini karena memperbaiki kampung ini menjadi tertata dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya rasa warga yang lain juga mendukung program ini"* (XBM-IPS-YM, 25-07-25). Selain itu, warga lainnya menyatakan, *"Sekarang*

lingkungan lebih bersih dan rapi, program ini sangat kami dukung karena manfaatnya langsung terasa” (XO-IPS-YM, 25-07-25).

C. Tanggapan Masyarakat terhadap Ketepatan Waktu dan Sasaran Program

Sebagian besar masyarakat menganggap program ini dilaksanakan pada waktu yang tepat, di mana kondisi lingkungan mereka memang sangat membutuhkan perbaikan. Waktu yang tepat untuk pelaksanaan program ini dianggap sangat menguntungkan, karena dapat langsung memberikan dampak positif terhadap kenyamanan dan kualitas hidup warga. Seorang warga menambahkan, *“Menurut saya, program ini datang di waktu yang pas. Kondisi kampung kami waktu itu memang sudah parah, jalan rusak, kalau hujan banjir. Jadi begitu ada perbaikan, kami merasa sangat terbantu”* (XBM-IPS-YM, 26-07-25).

Masyarakat juga merasa bahwa program ini sudah tepat sasaran, dengan 82% dari mereka menilai bahwa bantuan yang diberikan menyentuh wilayah yang membutuhkan. Banyak warga yang merasakan manfaat langsung, seperti perbaikan rumah yang sebelumnya bocor dan tidak layak huni. Seorang warga berpendapat, *“Yang dibantu itu memang RW-RW yang kondisinya sebelumnya tidak layak. Jadi menurut saya, program ini sudah mengenai sasaran”* (XKO-IPS-YM, 26-07-25).

D. Skor Sikap Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Penanganan Permukiman Kumuh Negeri Batu Merah

Dari hasil kuesioner, persepsi dan sikap masyarakat terhadap program ini menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan rata-rata skor 82,05%. Angka ini mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat mendukung dan aktif terlibat dalam program tersebut.

Tabel 1. Skor Aspek Sikap Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Penanganan Permukiman Kumuh Negeri Batu Merah

Jumlah Pertanyaan	Bobot	Frekuensi	Jumlah Skor
4	SS (5)	28	140
	S(4)	138	552
	N (3)	10	30
	TS (2)	0	0
	STS (1)	0	0
Jumlah		176	722
Skor Maksimal		880	
Presentasi Rata-rata		82,05%	

Berdasarkan hasil ini, masyarakat di Negeri Batu Merah berada dalam kategori tinggi dalam hal dukungan dan partisipasi terhadap program penanganan permukiman kumuh. Hal ini menunjukkan bahwa program ini telah berhasil menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat dan memperoleh dukungan yang kuat, yang menjadi modal penting untuk keberlanjutan program di masa depan.

3.3. Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Output Program Penanganan Permukiman Kumuh di Negeri Batu Merah, Kota Ambon

Program Penanganan Permukiman Kumuh di Negeri Batu Merah merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman yang selama ini terabaikan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan penyediaan rumah layak huni. Penelitian ini menganalisis persepsi masyarakat terhadap hasil atau output dari program ini, yang meliputi distribusi material, perbaikan jalan, drainase, dan rumah tidak layak huni, serta dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan.

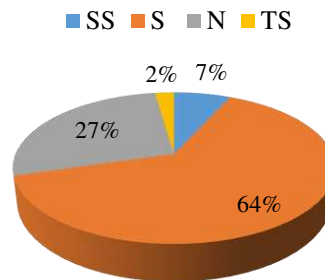
Output program ini dapat diukur secara fisik, seperti distribusi bahan material bangunan (semen, batu, pasir), pembangunan infrastruktur jalan, drainase, dan saluran air. Hasil yang sudah tercapai di Negeri Batu Merah mencakup distribusi material dan pembangunan fisik yang telah dilakukan meskipun belum

sepenuhnya merata di seluruh area kumuh. Ketergantungan pada kemampuan warga dalam mengelola bahan bangunan, serta keterampilan dalam pembangunan rumah layak huni, menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini.

A. Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Kesesuaian Hasil dengan Tujuan Program Penanganan Permukiman Kumuh

Tujuan utama dari berbagai program penanganan permukiman kumuh seperti KOTAKU, NUSP-2, dan NAHP adalah untuk mengurangi luas kawasan kumuh, meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan drainase, serta memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Secara umum, tujuan program penanganan kumuh menekankan peningkatan kualitas permukiman melalui perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas hunian, dan pengurangan kekumuhan secara bertahap (Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, 2020; World Bank, 2018). Temuan penelitian menunjukkan mayoritas warga menilai hasil seperti perbaikan jalan, drainase, dan akses air bersih sudah selaras dengan tujuan tersebut. Hal ini dapat dipahami melalui teori persepsi lingkungan: perubahan fisik yang nyata dan mudah diamati cenderung membentuk persepsi positif karena masyarakat mengalami manfaatnya secara langsung (Gibson, Reed, & Jones, 2015).



Gambar 4. Tanggapan Masyarakat Perihal Pembangunan Infrastruktur sesuai dengan yang dijanjikan

Berdasarkan diagram, 64% masyarakat setuju bahwa hasil program sesuai dengan tujuan yang dijanjikan. Salah satu warga menyatakan, "Sejak adanya program ini, jalan lingkungan yang dulunya rusak dan becek sekarang sudah bagus. Warga jadi lebih mudah beraktivitas, terutama anak-anak sekolah" (XBM-IKS-YM, 28-07-25).

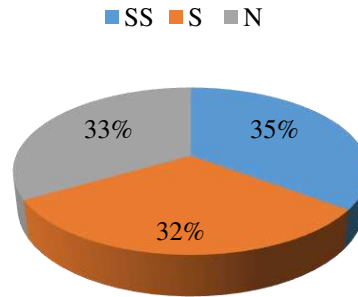
Namun, ada beberapa warga yang merasa bantuan perbaikan rumah belum mencukupi. Seorang warga menyampaikan, "Bantuan perbaikan rumah memang ada, tapi dana yang diberikan terasa kurang untuk memperbaiki kerusakan secara menyeluruh. Saya harus mengeluarkan biaya tambahan sendiri" (XKO-IKS-YM, 28-07-25).

Adanya sebagian warga yang menilai bantuan perbaikan rumah belum mencukupi mengindikasikan masih terdapat kesenjangan antara tujuan normatif dan realitas implementasi, terutama pada kecukupan dan pemerataan manfaat. Pola ini sejalan dengan studi evaluasi program sejenis yang menemukan bahwa pembangunan fisik sering dinilai positif, tetapi isu pemerataan, kecukupan dukungan, dan pemeliharaan masih menjadi catatan masyarakat (Kusnah et al., 2021; Yunita & Musiyam, 2020). Dengan demikian, persepsi masyarakat tidak hanya menunjukkan tingkat penerimaan program, tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik untuk memperbaiki desain program agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

B. Analisis Persepsi terhadap Dampak dan Perubahan yang Dihasilkan Program

Persepsi masyarakat terhadap dampak program penting untuk menilai efektivitas penanganan permukiman kumuh, karena dampak dipahami sebagai perubahan nyata yang dirasakan kelompok sasaran setelah intervensi dilakukan (Rossi, Lipsey, & Henry, 2019). Dalam penelitian ini, mayoritas warga menilai

program menghasilkan perubahan positif seperti aksesibilitas yang lebih baik, berkurangnya genangan/banjir lokal, meningkatnya akses air bersih, serta kenyamanan lingkungan dan hunian.



Gambar 5. Tanggapan Terhadap Dampak Program Bagi Masyarakat

Sebanyak 35% masyarakat merasa bahwa program ini berhasil meningkatkan akses mereka terhadap air bersih, perbaikan jalan, dan penyediaan rumah layak huni. Beberapa warga menyatakan, "*Kami sangat terbantu, rumah kami yang dulu rusak sekarang sudah diperbaiki lewat program itu. Lebih nyaman dan aman ditempati*" (XKO-IKS-YM, 28-07-25), serta "*Dulu tiap hujan pasti banjir karena saluran mampet, sekarang air cepat surut karena drainase sudah bagus*" (XO-IKS-YM, 28-07-25).

Namun, 33% warga memberikan tanggapan netral, mengakui adanya perubahan namun juga merasa bahwa masih ada bagian lingkungan yang belum mendapat perhatian, seperti jalan-jalan kecil yang belum diperbaiki. Seorang warga mengungkapkan, "*Program ini memang membantu, tapi belum semua warga merasakan manfaatnya secara langsung*" (XO-IKS-YM, 28-07-25).

Temuan tersebut sejalan dengan pendekatan *neighbourhood upgrading* yang menekankan bahwa peningkatan infrastruktur dasar skala lingkungan memberi dampak langsung pada kualitas hidup masyarakat (World Bank, 2018). Dari sudut persepsi lingkungan, perubahan fisik yang mudah diamati dan berpengaruh pada aktivitas harian, misalnya jalan yang lebih layak dan drainase yang berfungsi cenderung membentuk persepsi positif karena manfaatnya dialami langsung oleh warga (Gibson, Reed, & Jones, 2015). Meski demikian, adanya sebagian tanggapan netral menunjukkan dampak belum merata. Dalam evaluasi program, kondisi persepsi seperti ini biasa terjadi karena intensitas intervensi dan kondisi awal tiap lokasi berbeda, sehingga perubahan yang dirasakan warga tidak selalu sama (Patton, 2015).

C. Persepsi Masyarakat terhadap Keberlanjutan Program

Keberlanjutan hasil pembangunan menjadi penting untuk menilai efektivitas program. Masyarakat di Negeri Batu Merah menunjukkan keyakinan yang tinggi terhadap keberlanjutan hasil perbaikan infrastruktur yang telah dilakukan, meskipun sebagian juga berharap adanya pemeliharaan dan pendampingan jangka panjang. Sebanyak 66% masyarakat menyatakan setuju bahwa perbaikan yang dilakukan dapat bertahan dalam jangka panjang. Namun, beberapa warga juga menyarankan agar program ini dilanjutkan dan lebih ditingkatkan pengawasan serta pemeliharaan hasilnya. Seorang warga menyatakan, "*Menurut saya pribadi program ini sangat membantu, dan sebaiknya diteruskan. Masih ada lingkungan lain yang belum tersentuh, dan butuh perbaikan juga*" (XBM-IKS-YM, 28-07-25).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menilai hasil program berpotensi bertahan dalam jangka panjang, terutama pada infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan akses air bersih. Persepsi ini mengindikasikan adanya penerimaan sosial terhadap output program sekaligus keyakinan bahwa perubahan fisik yang sudah terjadi dapat terus digunakan. Dari perspektif evaluasi program, keyakinan masyarakat terhadap keberlanjutan sering muncul ketika manfaat program dirasakan langsung dan dianggap relevan dengan kebutuhan harian (Patton, 2015).

Namun, masyarakat juga menekankan perlunya pemeliharaan rutin dan pengawasan berkelanjutan agar infrastruktur tidak cepat rusak dan manfaatnya tidak menurun. Hal ini selaras dengan temuan studi program sejenis, bahwa tantangan utama keberlanjutan bukan hanya pembangunan awal, tetapi pengelolaan

pasca proyek, termasuk pembagian tanggung jawab pemeliharaan antara pemerintah dan warga (Kusnah et al., 2021). Dalam konteks partisipasi, keberlanjutan juga berkaitan dengan *sense of ownership*, yaitu rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan yang mendorong kepedulian untuk menjaga fasilitas bersama (Yunita & Musiyam, 2020).

Dengan demikian, persepsi masyarakat memperlihatkan bahwa program telah dinilai memberi dasar perubahan yang baik, tetapi keberlanjutan manfaat sangat bergantung pada keberlanjutan dukungan pemerintah, pengaturan pemeliharaan, serta penguatan peran masyarakat agar hasil program tidak hanya selesai dibangun, tetapi tetap berfungsi dan dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang.

D. Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Program Penanganan Permukiman Kumuh

Untuk menjawab tujuan utama penelitian, yaitu menganalisis persepsi masyarakat terhadap program penanganan permukiman kumuh, hasil analisis skoring dan tematik selanjutnya diinterpretasikan melalui dialog dengan kerangka teori dan temuan penelitian terdahulu. Persepsi masyarakat dalam penelitian ini dipahami sebagai proses kognitif dan afektif masyarakat dalam menilai, memaknai, dan mengevaluasi intervensi program pembangunan yang mereka alami secara langsung.

Secara teoretis, persepsi masyarakat terhadap program pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh output fisik yang dihasilkan, tetapi juga oleh pengalaman, harapan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses program (Gehl, 2011; Kusnah et al., 2021). Oleh karena itu, skor persepsi yang diperoleh melalui skala Likert tidak dimaknai semata-mata sebagai angka statistik, melainkan sebagai representasi penilaian sosial masyarakat terhadap kesesuaian pelaksanaan program, manfaat yang dirasakan, keadilan distribusi, serta keberlanjutan hasil pembangunan.

Hasil kuantitatif berupa indeks persepsi masyarakat kemudian didialogkan dengan data kualitatif dari wawancara dan observasi untuk menjelaskan mengapa masyarakat memberikan penilaian tertentu terhadap program NUSP-2, NAHP, dan KOTAKU. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan evaluasi pembangunan partisipatif yang menekankan bahwa keberhasilan program permukiman kumuh tidak hanya diukur dari capaian fisik, tetapi juga dari penerimaan sosial, rasa memiliki (*sense of ownership*), dan kepercayaan masyarakat terhadap program (World Bank, 2018; Yunita & Musiyam, 2020).

Dengan demikian, analisis persepsi masyarakat dalam penelitian ini tidak berhenti pada pengukuran tingkat setuju atau tidak setuju, tetapi diperluas menjadi evaluasi substantif mengenai sejauh mana program penanganan permukiman kumuh mampu menjawab kebutuhan masyarakat, membangun dukungan sosial, serta mendorong keberlanjutan pengelolaan lingkungan permukiman. Dialog antara temuan empiris dan kerangka teori ini digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan dan perumusan rekomendasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di Negeri Batu Merah, Kota Ambon.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa program ini telah berhasil memberikan dampak positif terhadap kondisi fisik lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Sebagian besar masyarakat merasa bahwa hasil yang tercapai sesuai dengan tujuan awal program, seperti perbaikan infrastruktur jalan, drainase, dan rumah layak huni. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti pemerataan manfaat, kelengkapan infrastruktur, dan pemeliharaan hasil yang telah dicapai. Ketidakpuasan masyarakat sebagian besar terkait dengan kurangnya dana yang disediakan untuk perbaikan rumah secara menyeluruh, serta beberapa wilayah yang belum sepenuhnya tertangani.

Secara umum, mayoritas masyarakat mendukung program ini dan merasa terlibat dalam pelaksanaannya, dengan tingkat partisipasi yang tinggi dalam kegiatan musyawarah dan perencanaan. Program ini juga dinilai memberikan manfaat langsung bagi kehidupan mereka, seperti mengurangi banjir, memperbaiki aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas tempat tinggal. Keberlanjutan hasil program juga menjadi perhatian utama masyarakat, dengan harapan adanya pemeliharaan dan peningkatan pengawasan

jangka panjang. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan antara harapan dan realitas yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa semua warga merasakan manfaat secara merata.

Berdasarkan temuan tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan keberhasilan program penanganan permukiman kumuh di masa mendatang. Pertama, penting untuk meningkatkan pemerataan manfaat, khususnya di kawasan-kawasan yang belum sepenuhnya tertangani, seperti jalan-jalan kecil yang masih rusak atau belum diperbaiki. Kedua, perlu adanya peningkatan dalam pemeliharaan dan pengawasan jangka panjang terhadap infrastruktur yang telah dibangun, agar manfaat program dapat bertahan dan dirasakan lebih lama. Ketiga, untuk perbaikan rumah, alokasi dana yang lebih memadai harus dipertimbangkan agar setiap warga dapat menikmati hasil program secara maksimal dan tidak terbebani dengan biaya tambahan yang tidak terduga.

Selain itu, penting untuk terus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap program, dari perencanaan hingga pemeliharaan. Peningkatan kesadaran dan rasa memiliki (*sense of ownership*) di kalangan masyarakat akan memastikan keberlanjutan program, serta memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan di masa depan. Pemerintah, bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, juga harus lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga program penanganan permukiman kumuh dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih besar bagi kualitas hidup masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A. C. (2012). *Pengantar analisis data penelitian kualitatif*. Rineka Cipta.
- Corbin, J. , & S. A. (2009). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. (2020). *Pedoman Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Republik Indonesia.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Gibson, J. J., Reed, E. S., & Jones, R. (2015). *The ecological approach to visual perception*. Psychology Press. (Original work published 1979)
- Kusnah, A., Riban Satia, M., & Putra, M. (2021). Persepsi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kawasan Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya. *Pencerah Publik*, 8, 38–49. <https://doi.org/10.33084/pencerah.v8i1.2265>
- Kwaikamtelat, G. (2019). Identifikasi karakteristik masyarakat di sempadan Kali Batu Merah Kecamatan Sirimau (Skripsi tidak dipublikasikan). Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Henry, G. T. (2019). *Evaluation: A systematic approach* (8th ed.). SAGE Publications.
- Safitri, Y. A., Fadirubun, F. F., & Madaul, M. (2022). Potrait of slums condition in Pandan Kasturi Village, Ambon City in 2013. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs) Conference Series*, 5(4), 83–91. <https://doi.org/10.20961/shes.v5i4.68974> Jurnal Universitas Sebelas Maret+1
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (4th ed.). Alfabeta.
- Syahrpiani, H. , I. S. , & N. S. (2020). Efektivitas Program KOTAKU di Desa Sayang, Jatinangor. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 20(1), 89–102.
- Toatubun, D., Lasaiba, M. A., & Sihasale, D. A. (2023). Study of slums on Jalan Sultan Hasanuddin RT 002/RW 010, Batu Merah Bawah Village, Ambon City. *Jurnal Pendidikan Geografi Unpatti*, 2(2), 151–162. <https://doi.org/10.30598/jpguvol2iss2pp124-136>
- World Bank. (2018). *Indonesia Urbanization Review: Managing Urbanization for Sustainable Growth*. World Bank Report. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29832>
- Yunita, T. W., & Musiyam, M. M. T. P. (2020). Persepsi masyarakat terhadap Program KOTAKU dalam penataan permukiman kumuh di Kampung Sangkrah, Kota Surakarta tahun 2020 (Skripsi tidak dipublikasikan). Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.